BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Permasalahan akuntabilitas publik bisa muncul apabila pemerintah daerah tidak mampu menyajikan informasi mengenai kinerja pemerintah secara relevan, handal, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat sebagai konstituennya (Depitasari dkk, 2012). Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan impilkasi bagi manajeman pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada pubilk, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem informasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi dalam mengahasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Mahaputra dan Putra, 2014).

Pengungkapankinerja keuanganadalah suatu kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah ats aktivitas pengelolaan sumber daya publik.*Govermental Accounting Standards Board* (1999) dalam *Concepts Statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintah yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan

tujuan yang telah direncanakan (Juita, 2014). Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan akuntabilitas. Sebagai perwujudan akuntabilitas, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif.

Suwarjono (2005:165)menyatakan Informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Agar informasi tersebut mudah untuk dipahami dan bermanfaat bagi penggunanya maka informasi tersebut harus bisa memenuhi kualitas tertentu.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kualitas kinerja keuangan merupakan laporan yang menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama satu periode guna mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dan menentukan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah setiap pemerintah daerah, baik pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi diwajibkan menerbitkan hasil

kinerja keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban telah berakhirnya tahun anggaran dan sebagai gambaran baik buruknya kinerja keuangan pemerintahan yang dipengaruhi kondisi ekonomi setiap Kabupaten/Kota.

Kondisi perekonomian Kabupaten Kudus semakin membaik seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat dan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus periode 2014 sampai dengan 2018 cenderung fluktuatif. Dalam kurun waktu 2013-2017, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 4,43% yang kemudian mengalami perlambatan pada tahun 2015, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus pada tahun 2017 sebesar 2,97 persen masih mengalami perlambatan.

Hal tersebut seiring dengan perkembangan ekonomi nasional dan regional yang dipengaruhi ekonomi global. Faktor utama pemicu perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan sektor industri pengolahan khususnya pada industri pengolahan tembakau yang mendominasi sekitar 80% lebih dari PDRB Kabupaten Kudus. Apabila pertumbuhan ekonomi dihitung tanpa industri pengolahan tembakau, pertumbuhan ekonomi terus mengalami pelambatan dari tahun 2014 sampai dengan pada tahun 2017 masing-masing sebesar 5,23 persen, 5,72 persen, 5,72 persen dan 5,38 persen(Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2018). Kondisi ekonomi di Kabupaten Kudus yang mengalami penurunan, dapat mengakibatkan pada realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Kudus yang berdampak pada penurunan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kudus.

Peningkatanpengelolaan keuangan yang dikelola eksekutif maka dapat mendorong kinerja keuangan. Pengaruh yang sangat erat ini disebabkan oleh masih belum maksimalnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dibidang keuangan. Nasution (2018) menyatakan bahwa pembuatan keputusan yang berhubungan dengan pelayanan publik, pemerintah daerah harus memiliki pengetahuan pengelolaan keuangan daerah dibidang keuangan.Secara teori, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupanmasyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, danmengembangkan jaminan sosial. Semakin tinggi anggaran belanja, serta semakin tinggi anggran belanja yang terealisasi maka menggmabrkan bahwa pemerintah daerah akanmemberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya. Anggaran belanja dan realisasi anggaran dari pengelolan keuangan pemerintah Kabupaten Kudus selama tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Anggaran dan Realisasi Anggaran Kabupaten Kudus tahun 2014-2018

No	Tahun	Anggaran	Terealisasi
1	2014	1.815.266.664.000,00	1.508.269.213.968,00
2	2015	-	-
3	2016	-	-
4	2017	2.168.040.915.000,00	2.006.998.142.948,00
5	2018	2.147.248.035.000,00	1.957.701.652.495,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, (2019).

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa selama periode 2014-2018 pemerintah Kabupaten Kudus tidak mampu menggunakan anggran

pemerintah secara penuh, khususnya pada tahun 2015 dan 2016 pemerintah Kabupaten Kudus tidak memiliki anggran untuk pembangunan struktural pemerintahan. Hal ini menandakan bahwa kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Kudus mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016 karena pada tahun tersebut anggaran keuangan pemerintah Kabupaten Kudus dapat dikatakan nihil.

Hasil penelitian Retnowati (2016) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintahan. Berbeda dengan penelitian Mustikarini danFitriasari (2012) menyatakan bahwa pengelolaankeuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintahan.

Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan tata kelolan pemerintahan yang baik dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini ditujukan agar kesadaran masyarakat meningkat terhadap penyelenggaraan administrasi publik dan pelaksanaan otonomi daerahyang memicu timbulnya gejolak yang berakar dari ketidakpastian dalam. Kondisi ini menyababkan instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah (Mardiasmo 2019).Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pendanaan pembangunan dan menggunakan dana publik sesuai dengan peraturan hukum, prioritas dan aspirasi

masyarakat. Kondisi seperti ini membuat peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk menyiapkan pegawai dan infrastruktur yang memadai.

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Organisai Perangkat Daerah

No	OPD	ASN	Pegawai Kontrak
1	Dinas Pehubungan	56	62
2	Dinas Kesehatan	172	215
3	Satuan Polisi	82	124
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95	106
5	Dinas Perdagangan	77	124

Sumber: Organisasi Perangkat Daerah, (2019).

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Kudus memiliki banyak pegawai kontrak daripada pegawai tetap (ASN), hal ini menyebabkan tata kelola pemerintahan yang kurang baik khusunya untuk pembagian tugas kerja yang terlalu dibebankan pada pegawai kontrak.Hasil penelitian Hastoro dan Sunardi (2016) menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintahan. Berbeda dengan penelitian Nasution (2018) menyatakan bahwa sistem pengelolaankeuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintahan.

Mardiasmo (2019:84) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan indikator kinerja keuangan pemerintah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Untuk penerapan sistem anggaran kinerja dalam

penyusunananggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut.Organisasi sektor publik karena sifatnya yang tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politk yang besar. Terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomi, efesiensi, dan efektivitas. Sistem akuntansi keungan daerah memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi yaitu mengkuantifikasikan keseluruhan kinerja terutama dalam ukuran moneter (Anitasari, 2016).

Hasil penelitian Stevani (2019) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintahan. Berbeda dengan penelitian Defitri (2018) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengajukan penelitian dengan judul "**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN, TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**".

1.2 Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan alur pembahasan yang baik dan terarah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Objek penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Kudus khusunya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kudus.

2. Variabel independen (bebas) penelitian adalah kinerja keuangan. Sedangkan variabel dependen (terikat) penelitian adalah pengelolaan keuangan, kekayaan daerah, tata kelola pemerintah dan sistem akuntansi keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan kinerja keuangan pemerintahan Kabupaten Kudus, maka permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengelolaan keuangan yang masih belum mampu memaksimalkan anggran dalan proses reliasisasi anggaran pada setiap organisasi perangkat daerah Kabupaten Kudus.
2. Masih terdapat tata kelola pemerintahan yang kurang baik khususnya pada pegawai harian lepas yang dibebankan tugas tidak sesuai yang ada pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Kudus.
3. Kurangnya pengetahuan akan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Permasalahan penelitian seperti di bahas pada latar belakang sehingga dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Apakah ada pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerinah Kabupaten Kudus?
2. Apakah ada tata kelola pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerinah Kabupaten Kudus?
3. Apakah adapengaruh sistem akuntansi keuangan pemerintahan terhadap kinerja keuangan pemerinah Kabupaten Kudus?

4. Apakah ada pengaruh pengelolaan keuangan, tata kelola pemerintah dan sistem akuntansi keuangan pemerintahan terhadap kinerja keuangan pemerinah Kabupaten Kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang berkiatan dengan kinerja keuangan pemerintahan, maka dapat dinyatakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerinah Kabupaten Kudus.
2. Untuk menganalisispengaruh tata kelola pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerinah Kabupaten Kudus.
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem akuntansi keuangan pemerintahan terhadap kinerja keuangan pemerinah Kabupaten Kudus.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan, tata kelola pemerintah dan sistem akuntansi keuangan pemerintahan terhadap kinerja keuangan pemerinah Kabupaten Kudus.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan kinerja keuangan pemerintah yang dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan daerah, tata kelola pemerintahan dan sistem akuntansi pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan pemerintah Kabupaten Kudus terhadap masyarakat mengenai aliran dana yang masuk dan aliran dana yang keluar agar terjalin kepercayaan publik.

UNIVERSITAS MURIA KUDUS